



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 26 April 2021

Halaman: 2

ANTISIPASI PEMUDIK DATANG LEBIH AWAL Posko PPKM Mikro Tingkatkan Pengawasan

YOGYA (KR) - Posko Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di tiap RT, RW atau kampung diminta meningkatkan pengawasan. Terutama untuk mengawasi yang datang lebih awal sebelum ada pelarangan dari pemerintah.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, menekankan pola pengawasan setiap pendatang akan disamakan seperti saat lebaran tahun lalu. "Siapa pun yang datang, terutama dari luar DIY akan dicatat dan dilaporkan ke tiap posko. Kemudian

posko PPKM mikro ini menayakan dokumen perjalanan termasuk identitas kesehatannya," jelasnya, Minggu (25/4).

Selain itu, pendatang pun diminta untuk segera melakukan isolasi mandiri selama lima hari meskipun dalam kondisi sehat. Jika terindikasi terpapar Covid-19 maka isolasi dilakukan minimal dua pekan. Isolasi mandiri bisa dilakukan di balai RT atau RW yang disediakan oleh wilayah. Tetapi jika tidak tersedia maka diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri di hotel.

Heroe menjelaskan, di Kota

Yogya terdapat sejumlah hotel yang melayani isolasi mandiri. Pemudik bisa memanfaatkan-nya namun dengan biaya sendiri. Kebijakan isolasi mandiri bagi pemudik ini pun tidak hanya dilakukan selama masa larangan mudik pada 6-17 Mei, tetapi sudah dimulai sejak saat ini. "Jika pendatang menunjukkan gejala klinis dan terkonfirmasi positif Covid-19, maka harus dirawat di rumah sakit," imbuhnya.

Oleh karena itu Heroe berharap pihak keluarga lebih baik meminta saudara dari luar daerah yang akan mudik untuk

menunda dulu keinginannya tersebut. Sedangkan untuk penyekatan di jalur masuk Kota Yogya, imbuh Heroe, cukup sulit dilakukan karena ada puluhan pintu masuk. Apalagi Kota Yogya berada di tengah-tengah dan tidak berbatasan dengan provinsi lain sehingga pendatang yang masuk pun sudah melewati penyaringan di perbatasan.

"Tetapi kami akan mencoba melakukan semacam pengecekan secara acak di sejumlah tempat umum seperti destinasi wisata dan pelayanan umum lain," tandasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			
3. BPBD			
4. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005